

BAB II **KAJIAN TEORI**

2.1 Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian dahulu ini disusun menjadi beberapa bagian yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai aspek yang relevan dengan penelitian ini. Di dalamnya, disajikan rangkuman dari berbagai penelitian terdahulu, baik yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku referensi, atau konferensi akademik, maupun penelitian yang belum dipublikasikan. Hasil penelitian tersebut berfungsi untuk memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian yang sedang dilakukan. Dengan merujuk pada karya-karya ilmiah yang sudah ada, penelitian ini akan memperoleh dukungan argumentasi ilmiah yang lebih kokoh, sekaligus membantu peneliti mengidentifikasi celah-celah yang mungkin masih ada di dalam studi-studi sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiarto (2023) berjudul “*Thematic Bureaucratic Reform for Poverty Alleviation: Policies and Implementation Dynamics*” bertujuan untuk mengamati proses pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan, dengan menyoroti bagaimana kebijakan yang diterjemahkan dari arahan Presiden Jokowi mengenai Reformasi Birokrasi Berdampak berusaha menyelesaikan permasalahan konkret yang dihadapi masyarakat. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen dari beberapa daerah, termasuk Provinsi Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Bulungan. Penelitian ini memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan yang dihadapi selama implementasi kebijakan, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya kuat dari pemerintah, pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik masih menghadapi banyak hambatan, seperti kurangnya koordinasi dan pemahaman di beberapa daerah, keterlambatan dalam perencanaan, anggaran dan perbedaan kapasitas di tingkat daerah, serta tantangan dalam keterlibatan berbagai pihak yang memperlambat proses implementasi akibat koordinasi yang kompleks.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Qori'ah Nur Riza dan Andi Lopa Ginting (2024) terkait “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran di Surabaya Melalui Program Rumah Padat Karya” bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Rumah Padat Karya di Kota Surabaya sebagai bagian dari kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, serta melibatkan pemerintah kota, lembaga terkait, dan masyarakat peserta program. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan signifikan, di mana tingkat kemiskinan di Surabaya menurun sebesar 2% pada triwulan II tahun 2022. Contoh nyata keberhasilan ini terlihat dari Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng, yang menghasilkan omzet hingga ratusan juta rupiah per bulan, melalui pelatihan kerja seperti barista, pemasaran, hingga tata boga. Program ini berhasil menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat lokal, dan menjadi model dalam implementasi reformasi birokrasi tematik di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andini Mutiara Putricia dan Ananta Prathama (2023) mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng di Kota Surabaya” tindak lanjut kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan melalui Program Rumah Padat Karya bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan fokus pada peningkatan pendidikan, aksesibilitas, usaha, pendapatan, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng, yang dijadikan sebagai prasarana percontohan. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif dalam hal peningkatan keterampilan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan pendapatan, meskipun dua dari sembilan tujuan pemberdayaan, yaitu perbaikan lingkungan dan kehidupan, belum tercapai sepenuhnya. Program ini menghadapi

tantangan berupa penurunan omzet pada tahun 2023, namun program ini telah menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya, meskipun masih perlu peningkatan dalam perbaikan lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Camelle Aqila, Anggraeny Puspaningtyas, dan M. Kendry Widiyanto (2024) dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Program Padat Karya Untuk Upaya Mengurangi Pengangguran Di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya” bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai bagian dari kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini berfokus pada efektivitas program dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Penelitian ini memberikan gambaran tentang dampak Program Padat Karya dalam memberdayakan masyarakat di Surabaya serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program serupa di daerah lain. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan program dalam mengurangi pengangguran di Kelurahan Dupak dengan memberikan pekerjaan kepada 14 warga yang sebelumnya menganggur, meskipun masih terdapat tantangan terkait partisipasi warga yang rendah, terutama karena kendala lokasi pekerjaan yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Kelima, penelitian pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Riyadi Sri Purnomo (2024) dengan judul “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan di Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Magetan)” bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di daerah, khususnya di Kabupaten Magetan, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga dan perbaikan data kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa Focus Group Discussion (FGD), studi literatur, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan utama dalam akselerasi program pengentasan kemiskinan, seperti data kemiskinan yang tidak valid, proses bisnis yang

tidak terpadu antar perangkat daerah, kebijakan pusat yang kaku dan kurang fleksibel, serta monitoring dan evaluasi yang lemah. Selain itu, kurangnya kebijakan teknis turunan memperlambat implementasi program di daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien guna mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Novia Nurul Badi'ah (2023) dengan judul “Digitalisasi Model Pelatihan untuk Pengembangan Kompetensi Pegawai Kemendikbudristek melalui Platform Wiyata Kinarya Merdeka Belajar (WKMB)” penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan transformasi model pelatihan konvensional menjadi pelatihan digital di lingkungan Kemendikbudristek melalui WKMB, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi 124.049 pegawai secara efisien dan masif, sekaligus mendukung Reformasi Birokrasi Tematik pada empat tema makro yang salah satunya pengentasan kemiskinan. Digitalisasi pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM Kemendikbudristek, menciptakan ekosistem pembelajaran kolaboratif, mendukung core value ASN BerAKHLAK, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ASN yang kompeten. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelatihan digital berbasis platform WKMB. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan program e-Learning Literasi Digital Gelombang I 2023, yang melibatkan 15.742 pegawai (12,69% dari total pegawai), serta menekankan peran ASN dalam mengaplikasikan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial-budaya untuk mendukung pengentasan kemiskinan di masyarakat. WKMB tidak hanya memenuhi hak ASN untuk pengembangan kompetensi tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang pada program pembangunan sosial-ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, melalui penciptaan SDM unggul yang berdaya saing.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Aditya Ari Nugroho, Munawar Noor, dan Charis Christiani (2021) dengan judul “Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik)” penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut dan mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan angka kemiskinan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, data dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat nasional dan lokal. Penelitian ini mencakup studi kasus di beberapa daerah yang dijadikan pilot project reformasi birokrasi tematik. Manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan dan rekomendasi perbaikan agar lebih tepat sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya reformasi, anggaran besar yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan sering kali tidak digunakan secara efisien dan lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan administratif. Hasilnya, reformasi birokrasi tematik belum sepenuhnya optimal dalam menurunkan angka kemiskinan, dengan banyak daerah yang belum mengalami dampak signifikan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas anggaran serta perbaikan koordinasi antar lembaga untuk memastikan dampak langsung pada masyarakat.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Tri Kurniawati Retnaningsih, Heffi Christya Rahayu, Febiana Gitya, dan Zulkarnaen (2024) dengan judul “Narrative Literature Review: Penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin” bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, terutama melalui program bantuan sosial. Dengan menggunakan metode narrative literature review yang menganalisis 12 jurnal ilmiah dan tesis/disertasi dalam lima tahun terakhir, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan program bantuan sosial dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program bantuan sosial telah memberikan manfaat positif seperti peningkatan konsumsi pangan dan penurunan tingkat kemiskinan, efektivitasnya masih jauh dari optimal. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi perencanaan yang matang, ketepatan sasaran,

koordinasi lintas sektoral, dan partisipasi aktif penerima manfaat. Namun, penelitian juga menemukan berbagai kendala, seperti ketidaktepatan data penerima, keterlambatan distribusi bantuan, kurangnya pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang terbatas.

Kesembilan penelitian berjudul "Analisis Naratif Kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia 2005-2025" oleh Rohman & Teguh Kurniawan (2023) bertujuan untuk menganalisis narasi reformasi birokrasi selama periode 2005–2025, mengevaluasi perkembangannya, serta memberikan rekomendasi untuk penyusunan narasi reformasi birokrasi periode 2025–2045. Menggunakan pendekatan interpretivisme dengan metode naratif, penelitian ini berupaya memahami struktur makna narasi dalam konteks historis, budaya, dan kelembagaan, dengan mengacu pada kerangka narasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi reformasi birokrasi di Indonesia tercermin dalam dokumen strategis seperti RPJPN, RPJMN, Grand Design Reformasi Birokrasi, dan peta jalan reformasi birokrasi. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa selama 20 tahun terakhir, konteks reformasi birokrasi belum banyak berubah, dan narasi masih mencerminkan karakter birokrasi yang antagonis. Peneliti merekomendasikan perlunya narasi yang lebih positif, berbasis identifikasi masalah yang menyeluruh, dengan intervensi kebijakan yang lebih terarah untuk periode 2025–2045 guna memastikan kesinambungan reformasi.

Penelitian yang dilakukan dengan judul "Optimalisasi Reformasi Birokrasi Tematik dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan yang Berdampak pada Masyarakat" memiliki perbedaan signifikan dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada strategi optimalisasi reformasi birokrasi tematik dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pengelolaan tata kelola kemiskinan dengan menggunakan lima indikator utama yaitu perbaikan proses bisnis, data, kebijakan/regulasi, reformulasi program, dan dukungan SPBE. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti karya Budiarmo (2023), yang lebih menyoroti hambatan koordinasi dalam implementasi kebijakan di beberapa daerah. Selain itu, penelitian lainnya lebih banyak berfokus pada evaluasi dan kajian kebijakan terkait reformasi

birokrasi. Sehingga penelitian ini menawarkan perspektif integratif yang dirancang untuk menjawab tantangan tata kelola yang kompleks. Tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan program, penelitian ini juga memberikan kerangka strategis yang terfokus pada optimalisasi. Dengan pendekatan yang lebih strategis, integratif, dan berorientasi pada hasil nyata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literature.

2.2 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance yang bertujuan untuk menciptakan perubahan pada sistem dan struktur pemerintahan. Sistem tersebut mencerminkan hubungan antara berbagai unsur dan elemen yang saling berpengaruh serta terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh (Rahmat Umasugi, Burhanuddin Kiyai, 2017). Menurut Mardiasmo reformasi birokrasi adalah langkah strategis yang diperlukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Prasojo & Kurniawan, 2008). Hal ini mencakup perubahan dalam struktur, proses, budaya organisasi, serta perubahan mindset dan komitmen lembaga pemerintahan dan pemerintah (Akbar et al., 2021).

Birokrasi menurut Max Weber merupakan suatu bentuk organisasi yang penerapannya berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, berfungsi sebagai sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional melalui berbagai peraturan untuk mengatur dan mengorganisasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang dengan cara yang teratur (Wkhid, 2011). Sementara itu, Peter A. Blau dan Charles H. Page menjelaskan bahwa birokrasi adalah jenis organisasi yang dirancang untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang secara sistematis (Wawan Risnawan, 2018). Ciri khas birokrasi meliputi pembagian kerja spesifik, kompetensi teknis, serta netralitas terhadap pengaruh external.

Tipe ideal menurut Max Weber adalah pendekatan yang mengalihkan fokus dari individu ke tingkat kelompok atau organisasi, dengan menekankan konstruksi analitik sebagai alat pemahaman fenomena sosial (Wkhid, 2011). Weber

mengidentifikasi tiga jenis tipe ideal berdasarkan tingkat abstraksinya. Pertama, tipe ideal yang berakar pada nilai dan sejarah yang khas, yang mengacu pada lingkungan budaya tertentu, seperti kapitalisme modern. Kedua, tipe ideal yang mencakup elemen-elemen abstrak dari realitas sosial, seperti birokrasi atau feodalisme, yang dapat ditemukan dalam berbagai model historis dan konteks budaya. Ketiga, tipe ideal yang digambarkan Raymond Aron sebagai "rekonstruksi rasional atas perilaku tertentu," yang mengacu pada perilaku manusia yang didorong oleh motif tertentu, seperti motif ekonomi. Berangkat dari abstraksi tipe ideal tersebutlah, kemudian Weber memberikan Argumen mengenai tipe ideal birokrasi berikut ini:

- a. Suatu pengaturan fungsi resmi yang terus menerus diatur menurut peraturan,
- b. Suatu bidang keahlian tertentu, yang meliputi :
 - 1) Bidang kewajiban melaksanakan fungsi yang sudah ditandai sebagai bagian dari pembagian pekerjaan sistematis,
 - 2) Ketetapan mengenai otoritas yang perlu dimiliki seseorang yang menduduki suatu jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini,
 - 3) Bahwa alat paksaan yang perlu secara jelas dibatasi serta penggunaannya tunduk pada kondisi-kondisi terbatas itu.
- c. Organisasi kepegawaian mengikuti prinsip hierarki; artinya pegawai rendah berada di bawah pengawasan dan mendapat supervisi dari seorang yang lebih tinggi.
- d. Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seorang pegawai dapat merupakan peraturan atau norma yang bersifat teknis. Kalau penerapannya seluruhnya bersifat rasional, maka (latihan) spesialisasi diharuskan.
- e. Dalam tipe rasional hal itu merupakan masalah prinsip bahwa para anggota staf administratif harus sepenuhnya terpisah dari pemilikan alat- alat produksi atau administrasi.

- f. Dalam hal tipe rasional itu, biasanya terjadi bahwa sama sekali tidak ada pemberian posisi kepegawainya oleh seseorang yang sedang menduduki suatu jabatan.
- g. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis.

Teori birokrasi Max Weber memberikan kerangka analitis yang relevan dalam memahami konsep reformasi birokrasi tematik. Reformasi birokrasi tematik menekankan kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan isu-isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan konsep birokrasi Weber yang menekankan struktur organisasi rasional dan sistematis. Tujuh komponen tipe ideal Weber, seperti pengaturan fungsi resmi yang terus menerus diatur dalam peraturan, pembagian bidang keahlian tertentu, prinsip hierarki organisasi, penerapan peraturan dan norma teknis yang rasional, pemisahan fungsi administratif dari kepemilikan alat produksi, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, serta pencatatan keputusan secara tertulis, bisa menjadi dasar dalam mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi tematik.

Dalam konteks reformasi birokrasi tematik, penerapan aturan yang berkelanjutan melalui roadmap reformasi birokrasi 2020–2024, pembagian tugas berdasarkan keahlian antar kementerian/lembaga, serta penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen teknis yang rasional merupakan wujud konkret dari implementasi konsep birokrasi Weber. Selain itu, prinsip hierarki dalam reformasi birokrasi tematik menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas kebijakan. Dengan demikian, konsep birokrasi Weber dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana reformasi birokrasi tematik tidak hanya mengubah tata kelola pemerintahan tetapi juga meningkatkan efisiensi birokrasi dalam menyelesaikan permasalahan strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan, secara lebih terstruktur dan sistematis.

2.3 Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik adalah kolaborasi efektif pelaksanaan reformasi birokrasi nasional yang dipokuskan pada isu startegis tatakelola pemerintahan (*governance*) bersifat lintas sektor atau lintas instansi pemerintah (*crosscutting*) yang *inline* dengan sasaran prioritas pembangunan nasional (Kemenpanrb, 2023). Sehingga dapat menjadi daya ungkit kuat dalam mempercepat pencapaian reformasi birokrasi nasional yang berdampak (*impact*) pada peningkatan capaian indikator kinerja pembangunan nasional dan indikator daya saing global. Dalam Permenpan RB Nomer 3 tahun 2023 RB Tematik merupakan strategi percepatan dalam mewujudkan dampak nyata dari berbagai agenda prioritas pembangunan nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurai serta menyelesaikan akar permasalahan dalam tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*), terutama yang berkaitan dengan berbagai isu tata kelola di tingkat hilir sesuai dengan tema yang telah ditetapkan (Pemenpanrb, 2023).

Implementasi RB Tematik dilakukan di tingkat nasional oleh kementerian atau lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator (*leading sector*) serta instansi pelaksana (*implementing agency*). Dalam reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola yang berkaitan langsung dengan isu prioritas nasional. Pendekatan RB tematik berfokus pada isu-isu spesifik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan, sebagaimana tercantum dalam road map reformasi birokrasi nasional yaitu meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden.

Khusus pada isu pengentasan kemiskinan, relevansi penerapan RB tematik semakin diperkuat oleh kondisi faktual masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp550.458 per kapita per bulan, atau sekitar Rp18.348 per hari. Komponen terbesar dari garis kemiskinan ini adalah pengeluaran untuk makanan, yang mencakup 74,21% dari total, yaitu sebesar Rp408.522 per kapita per bulan. Dengan demikian, individu dengan pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sebagai ilustrasi, pengeluaran sebesar Rp17.851 per hari hanya cukup untuk membeli sekitar enam bungkus mi instan, menggambarkan keterbatasan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Selain itu, perbedaan garis kemiskinan antarprovinsi di Indonesia mencerminkan variasi biaya hidup dan kebutuhan dasar yang berbeda-beda di setiap wilayah. Sebagai contoh, pada Maret 2023, Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp443.980 per kapita per bulan, dengan komponen makanan mencapai 75,18% dari total garis kemiskinan . Sementara itu, Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2024 mencatat garis kemiskinan sebesar Rp554.197 per kapita per bulan, dengan komponen makanan sebesar 74,57% . Perbedaan ini menunjukkan bahwa standar minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan sosial di masing-masing daerah.

Disisi lain, pendekatan pengukuran kemiskinan yang digunakan saat ini mendapat perhatian dari komunitas internasional. Bank Dunia, misalnya, merekomendasikan penggunaan standar garis kemiskinan global sebesar US\$3,20 per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP). Jika standar ini diterapkan di Indonesia, maka sekitar 40% penduduk akan tergolong miskin, menandakan bahwa ukuran nasional mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, perbedaan pendekatan ini menyoroti pentingnya evaluasi dan penyesuaian metodologi pengukuran kemiskinan agar lebih akurat dalam menggambarkan realitas sosial-ekonomi. Hal ini menjadi landasan penting bagi reformasi birokrasi tematik agar kebijakan dan program yang dirancang benar-benar responsif dan berdampak langsung pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.